kota Raja Banda Aceh pada tahun 1870, lintas kota Labuan dengan kota Medan tanggal 25 Juli 1870 yang di bangun oleh Deli Spoorwagen Matschappy (DSM).

Semakin meluasnya pemasangan lintasan-lintasan kereta api berbagai daerah di Indonesia di ikuti dengan berdirinya beberapa perusahaan kereta api swasta di Indonesia terutama di Jawa dan Sumatera. Saat ini terdapat dua belas perusahaan kereta api milik pemerintah, sehingga kolonial Belanda menetapkan kebijakan-kebijakan dalam bidang kepegawaian terhadap tenaga kerja pribumi. Gaji dan upah di sesuaikan dengan kebijakan yang di tetapkan oleh kolonial Belanda. Hal ini di sebabkan karena standar hidup rakyat Indonesia yang rendah. Hingga tahun 1895, jaringan jalan kereta api tidak hanya terdapat di Jawa dan Madura tetapi hingga ke Sulawesi.

2. **Jaman Pendudukan Jepang**

Dengan datangnya bala tentara Jepang, maka semua perkeretaapian di satukan dalam pimpinan yang di kuasai oleh pemerintah Jepang. Perkeretaapian di pulau Jawa berada di bawah Angkatan Darat Jepang (Rikuyu) dan di namakan "Rikuyu Sokyuku" dan kemudian di rubah menjadi "Tetsudo Kyoku" yang berkantor pusat di Bandung. Sedangkan perkeretaapian di Sumatera di bawah Angkatan Laut Jepang (Kargun) yang di namakan "Reta Sumatera Tetsudo" yang berkantor pusat di Sumatera Selatan. Suatu segi yang menguntungkan dalam kebijaksanaan kepegawaian saat itu adalah adanya penerimaan secara masal tenaga-tenaga berpendidikan menengah dan perguruan tingg. Pada akhir tahun 1942 dan 1943 yang nyata akan merupakan

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

tulang punggung dalam kehidupan perkeretaapian pada jaman pendudukan Jepang yang di lakukan dalam usaha kemenangan perang antar Jepang dan Sekutu.

3. Jaman Pemerintahan Republik Indonesia

Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 penguasaan perkeretaapian mulai beralih ketangan pemerintah Indonesia. Pada tanggal 28 September 1945 di dirikan Djawatan Kereta Api Republik Indonesia (DKARI) sebagai perusahaan kereta api pertama setelah pengalihan kekuasaan kepada pemerintah Republik Indonesia. Pada masa ini banyak kesulitan dan hambatan yang mengakibatkan timbulnya kelemahan di berbagai aspek usaha.

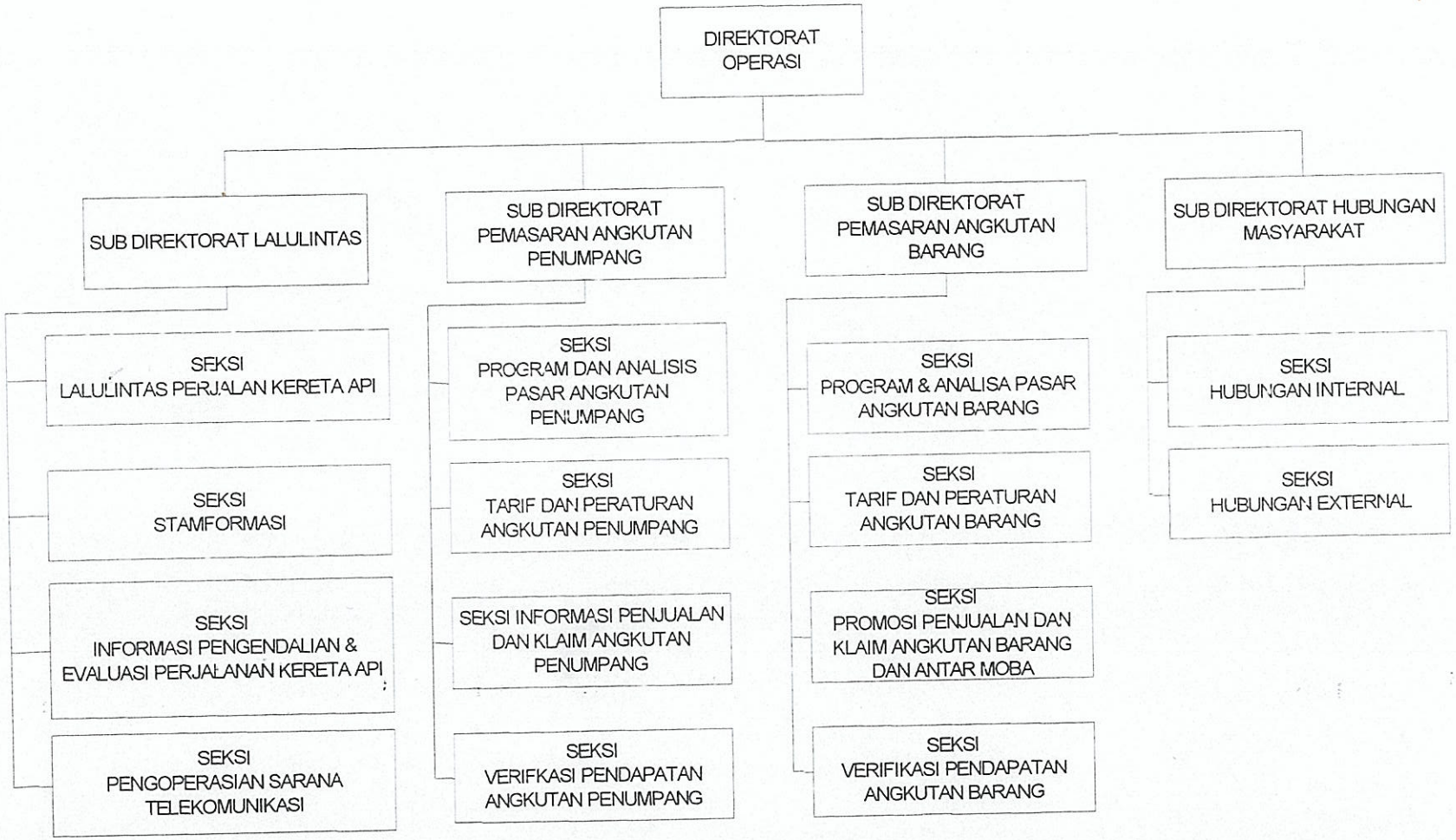
Para pemuda kereta api yang tergabung dalam Angkatan Muda Kereta Api (AMKA) melakukan aksi pengambilalihan kekuasaan perkeretaapian di tanah air. Pada tanggal 27 September 1949 pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.2 yang isinya menyatakan bahwa Djawatan Kereta Api Indonesia (DKARI) dan Staat Spoorwagen (SS) di gabungkan menjadi satu menjadi jawatan Kereta Api (DKA). Kemudian tanggal 25 Mei 1963 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.22 tahun 1963 status perkeretaapian berubah dari Djawatan Kereta Api (DKA) menjadi Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.61 tahun 1971, tanggal 15 September 1971 Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA) berubah lagi menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) dan selanjutnya berdasarkan keputusan Presiden No.44 tahun 1974, Perusahaan

Jawatan Kereta Api (PJKA) merubah unit organisasi dalam lingkungan Departemen Perhubungan di mana kedudukan, fungsi, tugas, dan susunan organisasinya di susun berdasarkan keputusan Presiden tersebut.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.57 tahun1991 terhitung tanggal 2 Januari Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) telah di ubah status menjadi Perusahaan Umum (Perum) yang artinya seluruh kepemilikan di kuasai negara. Maka tentunya perusahaan Perusahaan Umum Kereta Api (Perumka) harus meningkatkan kondisi perusahaan dari semua sektor yang ada. Selaras dengan modernisasi perkeretaapian dalam kaitannya dengan sistem transportasi nasional.

Perusahaan Umum Kereta Api (Perumka) berusaha untuk menekan kerugian sosial dengan cara meningkatkan produktivitas kereta api dan menggunakan peralatan dalam pengoperasian caranya secara optimal sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.19 tahun1998 terhitung sejak tanggal 1 Juni 1999 telah di alihkan usahanya dari Perusahaan Umum Kereta Api (Perumka) menjadi PT. Kereta Api dengan bentuk badan usaha Persero.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTORAT OPERASI



2.3 Deskripsi Jabatan

Adapun deskripsi jabatan di PT. Kereta Api (Persero) adalah sebagai berikut :

1. Direkorat Operasi

Merencanakan dan menentukan kebijaksanaan serta melaksanakan berbagai ketentuan dan ketetapan guna meningkatkan kinerja di setiap sub devisi. Direktorat Operasi membawahi beberapa sub direktorat, di antaranya sebagai berikut :

a. Sub Direktorat Lalu Lintas
b. Sub Direktorat Pemasaran Angkutan Penumpang
c. Sub Direktorat Pemasaran Angkutan Barang
d. Sub Direktorat Hubungan Masyarakat

Adapun tugasnya adalah :

- Menyusun program kebijakan-kebijakan di setiap sub direktorat.
- Menyusun rencana kerja tahunan dan melakukan pembenahan di setiap aspek atau bidang kerja.
- Melakukan evaluasi di setiap bagian / sub direktorat.

2. Sub Direktorat Lalu Lintas

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- Mengatur lalu-lintas perjalanan kereta api.
- Memberikan informasi mengenai jadwal keberangkatan kereta api, dan sebagainya.
- Melakukan pengendalian dan pengevaluasian terhadap perjalanan kereta api.

- Melakukan berbagai pengoperasian sarana telekomunikasi.

3. Sub Direktorat Pemasaran Angkutan Penumpang

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- Menyusun program dan evaluasi pemasaran angkutan penumpang, pengumpulan data dan pelaksanaan analisis pasar.
- Menyusun rencana dan evaluasi tarif angkutan penumpang, menyusun perubahan serta perbaikan peraturan dinas angkutan penumpang.
- Menyusun program dan evaluasi penjualan, promosi dan klaim.
- Menyusun program verifikasi pendapatan angkutan penumpang.

Bagan Sub Direktorat Pemasaran Angkutan Penumpang dapat di lihat pada struktur organisasi yang mencakup :

1. Seksi Program dan Analisa Pasar Angkutan Penumpang

Seksi Program dan Analisa Angkutan Penumpang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan evaluasi pemasaran angkutan penumpang, pengumpulan dan pengelohan data, serta melaksanakan analisis pasar.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Progran dan Analisa Pasar Angkutan Penumpang mempunyai fungsi :

- Penyusunan program dan evaluasi pemasaran angkutan penumpang serta evaluasi penyediaan fasilitas tempat duduk.
- Pelaksanaan penelitian pasar, pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan statistik penumpang dan analisa pasar.

- Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi program pemasaran angkutan serta evaluasi tingkat pelayanan penumpang.

2. Seksi Tarif dan Peraturan Angkutan Penumpang

Seksi Tarif dan Peraturan Angkutan Penumpang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan evaluasi tarif jasa angkutan penumpang dan peraturan angkutan penumpang serta penyelenggaraan tata usaha Direktorat Operasi dan Pemasaran.

Untuk melaksanaka tugas tersebut, Seksi Tarif dan Peraturan Angkutan Penumpang mempunyai fungsi :

- Penyusunan rencana dan evaluasi tarif jasa angkutan penumpang.
- Penyusunan rencana peraturan angkutan penumpang.
- Pelaksanaan tata usaha Direktorat Operasi dan Pemasaran.

3. Seksi Promosi Penjualan dan Klaim Angkutan Penumpang

Seksi Promosi Penjualan dan Klaim Angkutan Penumpang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program penjualan jasa angkutan penumpang, program klaim dan penyelesaian klaim.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Promosi Penjualan dan Klaim Angkutan Penumpang mempunyai fungsi :

- Melakukan penyusunan program dan pengevaluasian penjualan serta penyiapan karcis.
- Melakukan penyusunan program dan pengevaluasian promosi serta penyelesaian klaim.

Adapun fungsi dari Sub Seksi Tarif Angkutan Penumpang adalah :

a. Menyusun rencana tarif baru.
b. Evaluasi tarif.
c. Menghitung elastisitas.
d. Pemberian reduksi.

Disamping itu terdapat pula Sub Seksi Peraturan Angkutan Penumpang dan Sub Seksi Tata Usaha Direktur Operasi dan Pemasaran. Dimana, Sub Seksi Peraturan Angkutan Penumpang mempunyai tugas membantu Seksi Tarif dan Peraturan Angkutan Penumpang, dalam penyusunan rencana peraturan angkutan penumpang.

Adapun fungsi dari Sub Seksi Peraturan Angkutan Penumpang adalah :

- Pembaharuan syarat-syarat penumpang.
- Penyusunan buku jadwal dan tarif.
- Membuat atau memperbaharui perihal tarif angkutan penumpang.

Sedangkan Sub Seksi Tata Usaha Direktur Operasi dan Pemasaran mempunyai tugas membantu Seksi Tarif dan Peraturan Dinas dalam pelaksanaan tata usaha Direktur Operasi dan Pemasaran.

Adapun fungsi Sub Seksi Tata Usaha Direktur Operasi dan Pemasaran adalah sebagai berikut :

- Melakukan pengadministrasian surat masuk dan surat keluar.
- Melakukan seleksi dan memberi cacatan pada surat masuk.
- Melakukan penjagaan daftar pegawai Direktur Operasi dan Pemasaran.
- Mengurus tamu Direktur Operasi dan Pemasaran.

2.4 Aspek Kegiatan Perusahaan

PT. Kereta Api (Persero) merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa yaitu jasa transportasi. Sejalan dengan perkembangan ekonomi Indonesia yang semakin maju mengharuskan PT. Kereta Api (Persero) untuk bisa melayani jasa yang di hasilkan dengan baik agar dapat memuaskan keinginan serta kebutuhan konsumen.

Sejak Indonesia mengalami krisis ekonomi, PT. Kereta Api (Persero) melakukan kebijakan terhadap harga, karena harga merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan dalam suatu program yang di jalankan oleh suatu perusahaan. Harga merupakan satu-satunya unsur yang dapat memberikan pendapatan atau masukan bagi perusahaan, sedangkan unsur lainnya adalah produk, promosi dan saluran distribusi yang menimbulkan biaya atau pengeluaran. Harga juga dapat mempengaruhi seorang calon pembeli dalam melakukan suatu transaksi.

Suatu perusahaan perlu melakukan kenaikan harga apabila terjadi keadaan yang menjadikan biaya pengeluaran lebih besar dari pendapatan yang diterimanya. Faktor utama yang menyebabkan perusahaan untuk melakukan kenaikan harga adalah adanya inflasi. Faktor lainnya adalah untuk kelangsungan hidup suatu perusahaan sehingga perusahaan dapat bertahan dalam menjalankan operasinya.

Dampak adanya krisis ekonomi yang di alami Indonesia menjadikan PT. Kereta Api (Persero) melakukan kenaikan harga tiket. Dalam menetapkan kenaikan harga perusahaan di harapkan untuk menyesuaikan dengan kemampuan yang di miliki oleh konsumen. PT. Kereta Api (Persero)

UNIKOM

melakukan kenaikan harga tiket di karenakan naiknya bahan bakar (BBM) serta guna menutupi segala biaya operasi yang telah di keluarkan oleh perusahaan.

Dengan adanya kebijakan tersebut, maka PT. Kereta Api (Persero) dapat mempertahankan jumlah konsumen pengguna jasa. Sebab konsumen merupakan badan organisasi maupun individu yang memakai atau menggunakan barang dan atau jasa yang di hasilkan oleh suatu perusahaan.